



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEDAN - INDONESIA

Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1)
Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No. 4402/SK/BAN-PT/Ak-
PNB/S/VII/2022. Menyatakan Bahwa :

Nama : Indah My Sec Silalahi
NPM : 20230014
Program Studi : Administrasi Publik

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Dan Lisan Komprehensif Sarjana Ilmu
Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1).
Pada Hari Rabu, 28 Agustus 2024 Dinyatakan LULUS.

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dra.Natalia E.T.Sihombing, MSi |
| 2. Sekretaris | : Vera A.R. Pasaribu, S.Sus.,MSP |
| 3. Penguji Utama | : Dra.Artha Lumban Tobing, MSP |
| 4. Anggota Penguji | : Dr.Drs.Johnson Pasaribu, MSi |
| 5. Pembela | : Drs. Maringan Panjaitan, Msi |

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Diketahui

Dekan



Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia di skala kecil. Pemilihan kepala desa ada maka menandakan adanya aktivitas politik yang terjadi di desa tersebut. Pemilihan kepala desa merupakan praktik kontestasi politik yang ada pada tingkat pedesaan. Penyelenggara yang terlibat dalam kontestasi politik tersebut ialah peserta, dan pemilihnya itu adalah warga desa itu sendiri. Idealnya, pemilihan kepala desa harus mencerminkan kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Di Indonesia, pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-undang ini menegaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Namun dalam proses pemilihan kepala desa tersebut sering sekali diwarnai dengan adanya fenomena budaya politik uang.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Padang Mahondang Kecamatan pulau Rakyat Kabupaten Asahan periode Tahun 2022-2028 menghadirkan 5 (lima) calon. Berdasarkan pengalaman peneliti, dalam proses pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut terdapat praktik politik uang, dan hal itu diterima oleh masyarakat desa setempat, mereka menganggap hal itu merupakan hal yang wajar dan sudah lazim terjadi dan seakan menjadi syarat utama jika ingin menjadi pejabat dan bahkan telah jadi

budaya masyarakat setempat. Namun hal tersebut dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat desa yang rendah, tetapi cara ini merupakan sebuah kecurangan, dan Hal tersebut mencerminkan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi yang mendasar seperti keadilan, transparansi dan kesetaraan. dan cara ini berjalan tidak sesuai dengan prinsip Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang telah ditetapkan.

Menurut Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.112 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5, Pemilihan kepala desa ialah penyelenggaraan kedaulatan rakyat desa dalam rangka pemilihan kepala desa secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, serta adil. Sementara itu Budaya politik uang merujuk pada praktik penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya finansial untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih kepala desa. Budaya politik uang merupakan praktik pemberian imbalan materi kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pilihan mereka dalam proses politik dan pemilihan umum. Politik uang terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, adanya kesenjangan ekonomi, kesadaran dan pendidikan politik masyarakat yang kurang, penegakan hukum yang lemah dan karena budaya transaksional.

Praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemberian uang tunai, sembako, atau barang lainnya kepada masyarakat oleh calon kepala desa atau tim suksesnya. Selain itu juga terdapat pemberian janji-janji tertentu, seperti proyek pembangunan atau jabatan tertentu di desa, sebagai upaya untuk menarik suara pasyarakat. Praktik ini

berpotensi mempengaruhi keputusan pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Ada banyak ahli mengistilahkan praktek politik uang dengan kentut, ia terbaui tapi tidak tahu sumber dari bau tersebut (Maran, 2007) dalam jurnal (Rozy et al. 2020).

Menurut Astuti & Neny Marlina, (2022:160) dalam (Widia Putri 2023) Politik uang ialah suatu praktik yang menjadi tradisi di lingkungan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat memberi imbalan berupa dukungan suara kepada calon kandidat. Politik uang juga ditemukan sangat kental pada masyarakat desa, karena akan meningkatkan partisipasi masyarakat desa pada saat pemilihan akan dilaksanakan. Praktik semacam ini dapat mengurangi kualitas representasi politik, karena suara pemilih tidak lagi didasarkan pada program-program dan visi-misi calon, melainkan dipengaruhi oleh imbalan material yang diberikan. Demokrasi tidak akan ada ditangan rakyat lagi melainkan demokrasi akan ada diatas uang. Budaya politik uang dalam pemilihan kepala desa telah menjadi salah satu masalah yang terus-menerus mengancam integritas proses demokrasi di banyak desa. Politik uang yang telah membudaya ditengah-tengah masyarakat desa seakan telah menjadi syarat wajib bagi setiap calon pejabat untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat. Dan tentunya Kita tahu bahwa politik uang merupakan suatu kegiatan pelanggaran yang melanggar hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 187A Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima akan mendapatkan hukuman pidana.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana dampak politik uang terhadap keputusan pilihan masyarakat Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang fenomena budaya politik uang pada pemilihan kepala desa perlu untuk dilakukan untuk memahami dan mengetahui bagaimana dampak budaya politik uang terhadap keputusan pilihan masyarakat. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fenomena Budaya Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2022-2028 di Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana potensi budaya politik uang pada pilihan masyarakat dalam pemilihan kepala desa Di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Periode Tahun 2022-2028?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui potensi budaya Politik Uang pada pilihan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Periode Tahun 2022-2028”.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah serangkaian atau kumpulan manfaat yang dihasilkan dari peneliti, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun

untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti : Melalui penelitian ini peneliti dapat melatih dan mengimplementasikan secara langsung teori dan ilmu yang telah dipelajari dalam bangku perkuliahan dan dapat menambah wawasan yang lebih dalam tentang politik uang dalam pemilihan.
2. Bagi Universitas : Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan ilmiah dan literatur akademik tentang fenomena politik uang dan dapat digunakan sebagai referensi oleh para akademisi, peneliti dan praktisi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai fenomena politik uang yang terus terjadi.
3. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu budaya politik uang dan dapat mengetahui apa yang akan menjadi dampak serta diharapkan melalui penelitian ini masyarakat yang membacanya sadar akan dampak yang timbul dari praktik politik uang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fenomena

Fenomena berasal dari bahasa Yunani; phainomenon, "apa yang terlihat", fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti: "sesuatu yang luar biasa". Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Suatu kejadian adalah suatu fenomena. Suatu benda merupakan suatu fenomena, karena merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Adanya suatu benda juga menciptakan keadaan ataupun perasaan, yang tercipta karena keberadaannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:227). Masih menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata fenomena juga dapat bermakna fakta atau kenyataan. Pengertian fenomena sosial adalah masalah

sosial yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan suatu kehidupan kelompok sosial (*menurut Soerjono Soekanto : 1998*). Pengertian fenomena adalah suatu fakta yang kita temui di lapangan. (Freddy Rangkuti : 2011). Pengertian fenomena adalah sesuatu hal yang bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah menurut (Prof. Dr. Buchari Lapau, dr. MPH : 2012) dalam (Widia Putri 2023).

2.2 Budaya Politik

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak secara turun temurun (Wikipedia.org). Sedangkan menurut C Wissler, C Kluckhohn, A Davis, A Hoebel: budaya adalah segala tindakan yang harus dibiasakan dengan belajar (detik.com). Dan yang dimaksud dengan budaya politik adalah pola tingkah laku, sebagaimana dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira (1983 : 29) dalam (Prof. Dr. Aim Abdulkarim and Dra. Neiny Ratnaningsih 2012), bahwa:

“Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan komponennya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnya istilah budaya politik tertentu inheren (melekat) pada setiap masyarakat, yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup baik dalam sistem politik tradisional maupun modern”.

Pengertian *political culture* (budaya politik) menurut Almond dan Verba, (1990:20) dalam (Prof. Dr. Aim Abdulkarim and Dra. Neiny Ratnaningsih 2012) adalah bagaimana seseorang memiliki komponen , sikap, dan nilai nilai politik yang tercermin dalam sikap dan perilaku politiknya. Pengertian budaya politik menunjuk kepada suatu sikap komponen yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu Lebih lanjut menurut Almond dan Verba, warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan, perilaku tokoh-tokoh politik, keputusan alat kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik, serta bagaimana seharusnya ia berperan dalam sistem politik. Dari sinilah akan dapat dilihat pola komponen dari tiap warga negara terhadap sistem politik sebagai dasar dalam penentuan klasifikasi tipe kebudayaan politik.

2.2.1 Komponen dalam Budaya Politik.

Dalam pendekatan perilaku politik, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya yang akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan komponen sehingga timbul budaya politik. Komponen politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang. Komponen politik tersebut dapat dipengaruhi oleh komponen individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba (1984: 16) mengajukan klasifikasi tipe-tipe komponen politik, yaitu:

- 1) komponen kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya.
- 2) Komponen afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.
- 3) Orientas evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

2.2.2 Tipe Tipe Budaya Politik

Gabriel Almond dalam (Prof. Dr. Aim Abdulkarim and Dra. Neiny Ratnaningsih 2012) mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

- a. Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
- b. Budaya politik kaula (*subyek political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
- c. Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

2.3 Politik Uang

Politik uang adalah fenomena yang menggabungkan politik dan uang. Politik uang berasal dari dua suku kata, yakni politik dan uang. Adapun persamaan kata politik uang dalam Bahasa Inggris adalah *money politics*. Kedua kata ini mengisyaratkan makna yang berbeda. Politik mempunyai makna sendiri begitu pula dengan kata uang. Ketika kedua kata ini digabungkan, maka kemudian munculah makna yang baru. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum

Politik uang merupakan proses transaksional antara calon kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan dengan pemilih agar mendapatkan suara secara langsung maupun tidak langsung dari partai politik maupun tokoh masyarakat (Lampus, 2022:2). Politik uang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan pola yang berbeda. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa politik uang ini terjadi di setiap tingkat kepemimpinan yang ada, atau dengan kata lain politik uang ini dianggap punya pengaruh yang sangat luar biasa. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran yang terjadi pada saat masa kampanye atau pada masa sebelum hari pemilihan itu dilaksanakan.

Politik uang adalah fenomena serius dalam demokrasi yang masih terus berjalan yang menggambarkan adanya penggunaan alat transaksional berbentuk uang atau imbalan sejenisnya yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang, kelompok atau lembaga dalam mengambil keputusan (Darma, 2022:2). Serta pendapat menurut Astuti dan Neny Marlina (2022:160) Politik uang adalah suatu

praktik yang menjadi tradisi di lingkungan masyarakat memberi imbalan berupa dukungan suara kepada calon kandidat. Politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. politik uang atau suap baik pihak pemberi maupun penerima, semuanya telah melakukan pelanggaran yang fatal karena politik uang telah menciptakan kerusakan dalam demokrasi dan mengkhianati kepercayaan publik.

2.3.1 Faktor Penyebab Politik Uang

Menurut Fitriani & L. Wiwesapta, (2019:57) dalam (Widia Putri 2023), ada beberapa faktor penyebab terjadinya politik uang yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan Ekonomi

Pemicu terjadinya politik uang tak lepas dari keterbatasan ekonomi yang sampai saat ini kerap menimbulkan permasalahan, salah satunya menjadi pembuka kesempatan adanya politik uang didalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa selama ini kemiskinan membuat masyarakat berpikir rasional untuk mendapatkan keuntungan, termasuk pada saat menerima pemberian atau hadiah baik dalam bentuk uang maupun materi dari salah satu kandidat peserta pemilu. Praktek politik uang tak mudah dicegah serta dihentikan jika persoalan tentang kemiskinan serta ekonomi masih dialami oleh masyarakat.

2. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat tentunya tidak lepas dari faktor ekonomi yang rendah juga yang dapat menghambat masyarakat

untuk mendapat pendidikan yang lebih baik pula, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir serta perilaku masyarakat dalam menjalankan suatu hal. Rendahnya kualitas pendidikan akan menyebabkan masyarakat mempunyai pengetahuan politik yang rendah juga sehingga akan ada pelanggaran yang terjadi di pemilu. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam menghadapi praktik politik uang yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari mudahnya masyarakat menerima beberapa reward yang diberikan kepadanya, dan masyarakat akan gampang dipengaruhi oleh kelompok tertentu agar mereka memilih kandidat tertentu. Masyarakat semakin acuh pada penyimpangan yang ada, yang berdampak pada minimnya kesadaran politik sehingga partisipasi politik pun akan semakin rendah.

3. Lemahnya Pengawasan

Praktek politik uang akan sukar dihilangkan ataupun dikurangi jika tidak ada kerjasama yang baik dari pihak yang terkait dengan masyarakat dalam mengawasi praktik politik uang, terlebih lagi pada saat menjelang waktu pemilihan. Dengan pengawasan yang lemah tersebut maka akan lebih menekankan pada adaptasi seseorang terkait aturan yang mengawasi praktik politik uang. Dimana karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah akan mempengaruhi juga pola pikir masyarakat, sehingga tidak bisa memahami serta memfilterisasi secara baik tentang aturan pengawasan tersebut yang dilaksanakan untuk meminimalisir praktek money politic di masyarakat.

4. Tradisi Serta Kebiasaan

Praktek politik uang yang sering terjadi dimasyarakat jika dibiarkan maka akan jadi sebuah kebiasaan yang akan selalu dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena praktek politik uang yang terjadi selama ini, akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan serta minimnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat yang tak tahu adanya praktik politik uang yang terjadi pada saat pemilihan umum terjadi. Ketidaktahuan masyarakat akan praktek politik uang ini membuat hal ini akan terus terulang kembali, bahkan akan menjadi kebiasaan pada saat pemilu, serta dapat membuat masyarakat menganggap bahwa hal ini adalah hal yang wajar terjadi.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Politik Uang

Menurut umam (2006), bentuk-bentuk politik uang atau *money politic* dalam pemilihan umum antara lain sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang

Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan umum, uang sangat berperan penting. Modus *money politic* dalam bentuk uang yang terjadi dan sering dilakukan yaitu:

1. Sarana Kampanye, Caranya itu dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acara pun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
2. Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.
3. Bantuan Langsung, Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

b. Berbentuk Fasilitas Umum

Politik uang dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihnya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian berkat. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui politis ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Musholla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

2.3.3 Strategi Politik Uang

Menurut Irawan (2015), terdapat dua macam strategi yang biasanya digunakan dalam menjalankan politik uang atau *money politic*, yaitu:

1. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar pada umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

2. Mobilisasi Massa.

Mobilisasi massa biasa terjadi saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-iming sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik atau calon pemimpin. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang kampanye akan memilihnya kelas.

2.4 Pemilihan Kepala Desa

Kata Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca adalah tanah air, tanah kelahiran maupun tanah asal. Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan

kabupaten yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa merupakan seorang figur yang sangat penting perannya pada sebuah desa, oleh karena itu untuk mendapatkan hal tersebut, seorang calon kepala desa harus menempuh berbagai prosedur dan persyaratan. Hal ini dimaksudkan agar seleksi pemilihan kepala desa dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada agar mendapatkan seorang kepala desa yang dapat memimpin dan memajukan desa, memilih dan menetapkan kepala desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan otonomi desa serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasaan secara baik dan benar.

Dalam UU No.6 tahun 2014 pasal 31 menyatakan bahwa “Pemilihan kepala desa diselenggarakan secara bersamaan di berbagai wilayah kabupaten atau kota dengan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara bersamaan”. Pemilihan kepala desa merupakan suatu ajang atau praktik kontestasi politik pada tingkat pedesaan yang digunakan untuk menyeleksi calon kepala desa yang akan memimpin suatu desa dalam jenjang waktu tertentu. Adapun yang terlibat baik sebagai penyelenggara, peserta, dan pemilihnya adalah warga itu

sendiri. Dengan diadakannya pemilihan kepala desa, diharapkan masyarakat terlatih untuk memperhatikan pemimpinnya dan nantinya mengetahui apa, siapa, dan bagaimana pemimpin dipilih. Dalam memilih pemimpin desa, sebaiknya utamakan kemampuan calon pemimpin tersebut. Desa dapat dipimpin tidak hanya oleh pemimpin yang berkarakter tetapi juga oleh pemimpin yang mempunyai tantangan secara intelektual, moral, dan sosial.

Tujuan pemilihan kepala desa adalah untuk memilih calon kepala desa yang mampu memimpin desa dan menyampaikan perasaan masyarakat serta pembangunan desa. Selain itu, pemilihan kepala desa merupakan partai politik yang demokratis bagi warga pedesaan, dan kebebasan memilih warga tetap terjamin. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014, pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Syarat untuk menjadi Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan yang tertulis dalam UU No.6 tahun 2014 pasal 33 & 34.

2.5 Perilaku Pemilih

Partisipasi masyarakat pada sebuah pesta demokrasi sangat penting karena itu merupakan sebuah aktivitas dalam menentukan pilihan masyarakat dalam memilih pemimpin yang akan memimpin mereka nantinya. Dalam berpartisipasi untuk mendukung jalannya demokrasi, para pemilih juga berhak untuk memiliki karakteristik sendiri. Menurut Jama, (2021:291) dalam (Widia Putri 2023) perilaku pemilih ialah tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh pemahaman

terhadap politik yang bisa dijadikan dasar dalam menentukan sebuah kriteria seorang pemimpin yang diinginkan dan pastinya berdampak bagi hasil pemilihan. Samuel P. Huntington (1990:16) dalam (Ori Trihapsari Kaesmetan) berpendapat bahwa perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sementara menurut surbakti dalam efriza (2012:480) dan Ori Tri Hapsari Kaesmetan perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan. Kegiatan pengambilan keputusan disini adalah untuk memilih ataupun tidak memilih di dalam suatu pemilu maka *voters* memilih atau mendukung kandidat tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas maka, perilaku pemilih dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan seseorang maupun sekelompok orang (masyarakat) yang dipengaruhi dengan pemahaman politiknya yang nantinya akan mempengaruhi pilihan pemimpin yang diinginkan serta perilaku pemilih itu tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi politik dan penting dalam kegiatan politik.

Menurut Kristiadi (1994:76) dalam (Kaesmetan 2019), penelitian mengenai perilaku memilih (*voting behavior*) dalam pemilu pada dasarnya mempergunakan beberapa pendekatan yang berkembang selama ini yaitu:

a. Pendekatan Sosiologis

Dalam pendekatan ini perilaku pemilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam pendekatan ini, agama,

pendidikan, jenis kelamin, faktor geografis, budaya serta variabel sosial adalah variabel yang dominan dalam mempengaruhi seorang pemilih dalam menentukan pilihannya.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini muncul karena timbulnya ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dinilai kurang dapat menjelaskan secara metodologis kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam pendekatan ini perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor-faktor identifikasi partai, informasi politik, ketertarikan terhadap isu politik.

c. Pendekatan Rasional

Pendekatan ini lahir sebagai bentuk ketidakpuasan pada pendekatan sosiologis serta psikologi. Pendekatan ini melihat kegiatan melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Perimbangan untung rugi bagi pemilih dipakai untuk menentukan pilihan pada calon atau partai yang akan dipilihnya, terlebih lagi untuk memutuskan apakah akan ikut serta memilih atau sebaliknya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya. Perbandingan yang dapat dijadikan peneliti sebagai inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang akan penulis kaji:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, Fakultas Dan Universitas	Judul Penelitian	Jenis Dan Metode penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sitta Al Savira (2016) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013.	Skripsi Metode Kualitatif Deskriptif.	untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Politik Uang Dan Faktor – Faktor Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tahun 2013.	Bahwa praktik politik uang sering terjadi Pada pemilihan kepala desa cibeuteung udik, perilaku politik masyarakat desa Cibeuteung udik dalam pemilihan kepala Desa Cibeuteung Udik Tahun 2013. Mengarah pada perilaku pemilih sosiologis, masyarakat memilih berdasarkan adanya hubungan kekerabatan/ keluarga, ada juga yang memilih berdasarkan Tempat/ kediaman masyarakat yang dekat dengan kediaman calon kepala desa Cibeuteung udik. Selain itu, perilaku politik masyarakat desa cibeuteung udik menunjukkan pemilih yang rasional yaitu pemilih yang menghitung untung dan Rugi dari tindakannya terhadap menentukan pilihannya. Faktor-faktor yang mendorong praktik politik uang cukup kuat dalam pemilihan kepala desa Cibeuteung udik, seperti faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan.
2.	Salsabila	Fenomena	Jurnal	Untuk Melihat	Bahwa minat

	Athaya Fauzi, Agus Machfid Fauzi, Fakultas Sosiologi Universitas Negeri Surabaya.	<i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018.	Dinamika Sosial Budaya, Vol 23, No.1, Juni 2021, Metode Kualitatif	Alasan Masyarakat Mengambil Uang Yang Berasal Dari Calon Kepala Desa.	masyarakat untuk datang ke TPS dapat dibeli dengan uang. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat pada calon kepala desa sehingga mereka memilih untuk golput, jika tidak ada uang atau umpan untuk pergi maka tidak akan pergi. Masyarakat yang diberi uang merasa bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan jika mengambil uang tersebut dan menjalankan hak suara yang mereka miliki.
3.	Annisa Gusti Erliana (2021) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.	Praktek <i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Kepala Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.	Skripsi Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.	Untuk Menggambarkan Dan Menganalisis Bagaimana Faktor-Faktor Terjadinya Money Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Tersebut.	Menjelaskan bahwa penyebab terjadinya Praktek <i>money politic</i> dalam pemilihan kepala desa di desa karama yaitu Faktor ekonomi, faktor tradisi atau kebiasaan serta kurangnya sosialisasi Politik yang dilakukan pemerintah.
4.	Santika (2023) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	<i>Money Politic</i> Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Dan Maqashid Syariah (Studi Di Bonne-	Skripsi Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Yuridis Empiris.	Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Politik Uang Di Desa Bonne-Bonne Tahun 2021 Dan Bagaimana Jika Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Dan	Faktor penyebab adanya politik uang yaitu kurangnya Pemahaman masyarakat terhadap politik terjadi karena tergolong rendahnya Tingkat pendidikan dan sikap apatis yang acuh tak acuh terhadap politik. Politik Uang dapat ditangani dengan menggunakan tinjauan peraturan menteri dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 dan dari sudut pandang keislaman yaitu

		Bonne Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat).		Maqashid Syariah Dalam Menangani Politik Uang Di Desa Bonne Bonne.	maqashid Syariah jika berpedoman pada kedua perspektif tersebut maka politik uang akan perlahan hilang dari kehidupan bermasyarakat dan akan mendapatkan pemimpin Yang layak untuk memegang kepemimpinan tersebut.
5.	Widia Putri (2023) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi.	Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tenam Kabupaten Batanghari Pada Tahun 2022.	Skripsi Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.	Untuk Mengetahui Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Tenam Kabupaten Batanghari Terhadap Politik Uang Yang Terjadi Sebelum Dilakukannya Pemilihan Kepala Desa Serta Menganalisa Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Politik Uang Terjadi Dikalangan Masyarakat Setempat.	Bahwa persepsi masyarakat terhadap politik Uang adalah negatif. Masyarakat memahami bahwa politik uang adalah suatu Pelanggaran. Masyarakat juga mengetahui apa dampak yang akan terjadi jika Politik uang terus terjadi di kalangan masyarakat setempat. Artinya, pengetahuan Masyarakat terhadap politik uang tidak terlalu lemah. Namun masyarakat tetap Menerima politik uang dan didorong oleh berbagai macam faktor. Faktor penyebab Terjadinya politik uang tersebut berupa persaingan, kebudayaan, lemahnya Pengawasan, dan lemahnya kesadaran hukum.

Dari kelima hasil penelitian terdahulu diatas maka persamaan penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji atau dilakukan oleh penulis saat ini yaitu sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk dapat mendeskripsikan permasalahan yang terjadi serta sama sama dilakukan di sebuah desa. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini akan menjelaskan bagaimana politik uang ini diterima oleh masyarakat atau para pemilih dan pemilih tetap memilih pemimpin yang menurut mereka baik dan cocok untuk posisi tersebut serta politik uang tidak dapat mengalihkan pilihan para pemilih dan tetap memilih calon yang tepat dengan melihat dari jejak dan latar belakang calon kepala desa tersebut dan perbedaan lokasi penelitian.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah konsep yang digunakan dalam analisis dan pengembangan teori, termasuk dalam politik uang. Kerangka berpikir merupakan struktur yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu teori atau konsep dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau masalah. Di dalam fenomena budaya politik uang, kerangka berpikir digunakan untuk memahami bagaimana politik uang berpengaruh terhadap pilihan pemilih. Kerangka berpikir politik uang dapat dikembangkan dari berbagai sumber, termasuk kajian pustaka, deskripsi pustaka, dan kajian teori.

Kerangka berpikir pada penelitian ini dimulai dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala desa yang dimana seharusnya pemilihan tersebut dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, Namun pelaksanaan pemilihan kepala desa seringkali diwarnai dengan praktik politik uang yang menjadi bagian dari fenomena budaya politik.

Budaya politik uang dianggap sebagai perilaku tidak etis dan tidak demokratis karena mencederai asas pemilu yang berintegritas serta merusak nilai-nilai partisipasi politik yang seharusnya didasarkan pada kesadaran dan pilihan rasional pemilih. Politik uang terjadi karena adanya unsur-unsur, faktor faktor penyebab terjadinya politik uang dan strategi yang dilakukan dalam politik uang. Oleh karena itu praktik politik uang ini bisa saja dapat mempengaruhi pilihan para pemilih dan bisa saja tidak mempengaruhi pilihan para pemilih. Berikut adalah gambar kerangka berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu:



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep berarti gagasan umum yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami sesuatu dalam penelitian ini. Maka Untuk mempermudah ke tahap selanjutnya penelitian ini akan mengemukakan definisi konsep yaitu :

□ Budaya Politik Uang:

- Suatu sistem nilai, norma, dan praktik yang telah terinternalisasi dalam masyarakat di mana pemberian atau penerimaan uang atau barang berharga menjadi bagian integral dari proses pemilihan.
- Ini melibatkan pertukaran suara dengan imbalan materi, yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan bermartabat.
- Budaya politik uang dapat Diukur melalui frekuensi terjadinya praktik politik uang, persepsi masyarakat tentang praktik tersebut, dan adanya norma sosial yang mendukung praktik tersebut.

□ Politik Uang:

- Praktik memberikan atau menerima uang atau barang berharga dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan.
- Ini merupakan bentuk korupsi yang merongrong integritas proses demokrasi.

- Politik uang dapat diukur melalui pemberian atau penerimaan uang atau barang berharga secara langsung atau tidak langsung kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka.

□ **Pemilihan Kepala Desa:**

- Proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat desa untuk memilih seorang pemimpin yang akan memimpin pemerintahan desa.
- Proses ini seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan persamaan.

□ **Potensi:**

- Kemungkinan atau kecenderungan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena.
- Dalam konteks ini, potensi mengacu pada kemungkinan terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa.
- Potensi dapat Diukur melalui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik politik uang, seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, pengawasan penyelenggaraan pemilihan, dan peran tokoh masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, minat, motivasi dan Tindakan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Jenis penelitian dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Metode penelitian ini merupakan suatu metode yang cocok digunakan dalam penelitian dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Fenomena Budaya Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 Di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.

3.2 Lokasi

Lokasi penelitian merupakan sumber diperolehnya data dari sebuah masalah yang diangkat dan yang akan diteliti, oleh karena itu penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.

3.3 Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu penelitian

No	Jenis Kegiatan	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024	Agustus 2024
1.	Pengajuan Judul									
2.	ACC Judul									
3.	Penyusunan Proposal									
4.	Bimbingan Proposal									
5.	Seminar Proposal									
6.	Revisi Proposal									
7.	Perencanaan Penelitian									
8.	Bimbingan Skripsi									
9.	Ujian Meja Hijau									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari orang yang akan diwawancarai langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini maka informannya terdiri dari :

a. Informan Kunci

Informan yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang diangkat dan dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Maka pada penelitian ini informan kuncinya adalah masyarakat yang ikut memilih yaitu Bapak B.Sibarani, H.Sianipar, M.Silalahi, H.Hutauruk, S.Tampubolon dan Ibu E.Ambarita, K.Sianipar.

b. Informan Utama

Informan utama adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informan utamanya adalah tim sukses calon kepala desa yaitu Bapak O.Hutauruk, P.Naingolan dan R.Nababan.

c. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan pada suatu

penelitian. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah calon kepala desa yaitu Bapak P.Siregar.

3.5 Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data atau *data collection* adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam pengumpulan data secara sistematis untuk dianalisa. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di Lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua pihak yaitu pewawancara dan dengan orang yang akan diwawancarai untuk bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu. Dalam melaksanakan teknik ini penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dari narasumber dengan menggunakan alat bantu peneliti diantaranya alat tulis, handphone, dokumentasi dan alat perekam.
2. Data Sekunder adalah data yang sudah diproses oleh orang lain sehingga data tersebut tersedia ketika kita membutuhkan nya seperti penelitian terdahulu, jurnal, artikel, situs web atau internet yang berhubungan dengan penelitian ini serta buku-buku ilmiah

yang berkaitan juga dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

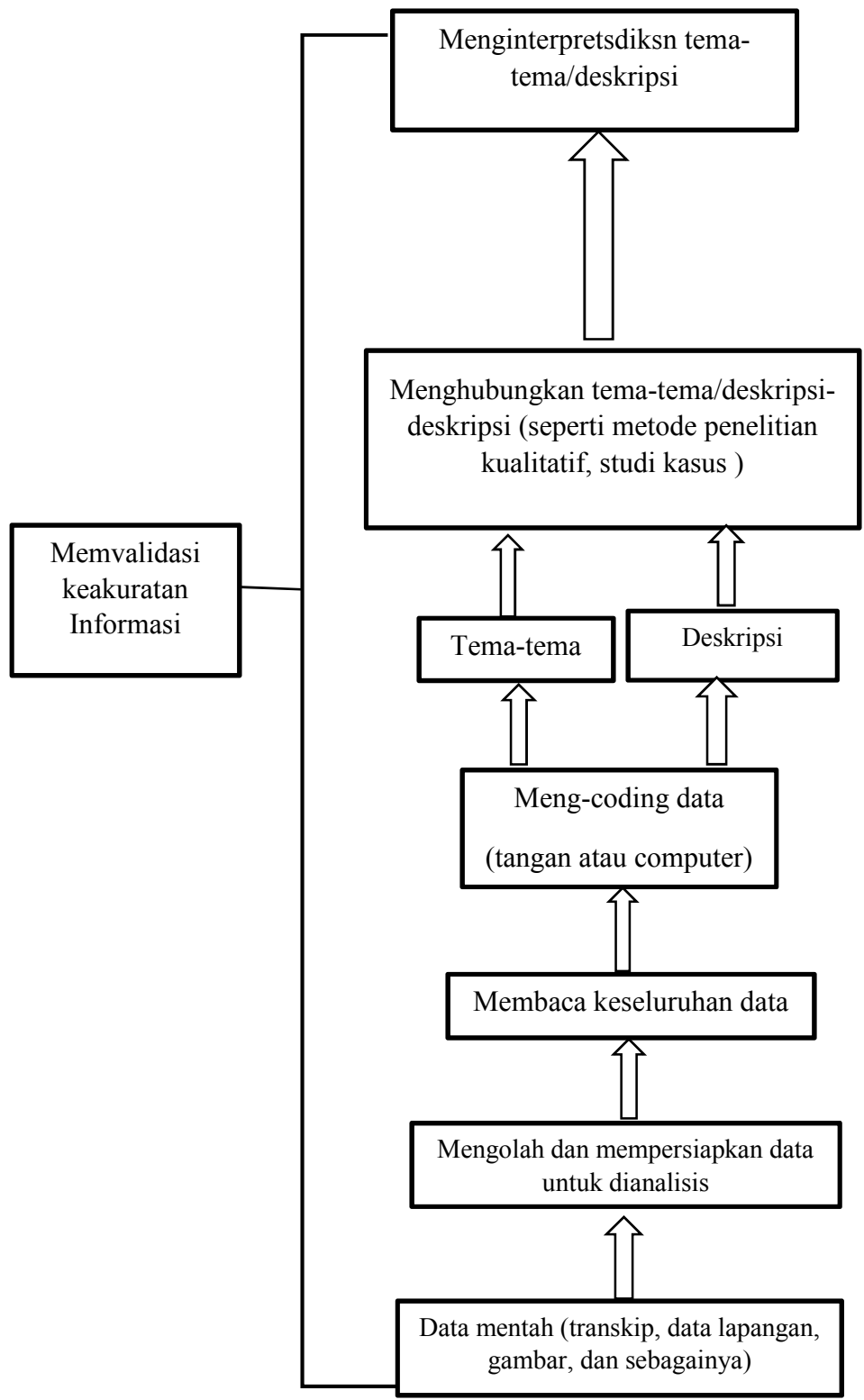
Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. (Creswell 2010).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan scanning materi, menulis data serta memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi yang didapatkan.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun generealense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis secara detail dengan meng-coding data. Coding data merupakan proses pengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Dalam langkah ini melibatkan beberapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan

selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf.

4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang dianalisis.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi data atau memaknai data.



Gambar 3.1

Teknik Analisis Data

Sumber : (Creswell 2015)